Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 4, No. 2, Agustus 2025 ISSN: 29622743

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Talaga Jaya

(Community Participation in the Development of Decent Housing in Talaga Jaya District)

Dini Ariska[1], **Yanti Aneta**[2], **Alfiyah Agussalim**[3]
[1,2,3]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
ariskadini04@gmail.com[1] , yanti_aneta@yahoo.ac.id[2] , alfiyahagussalim.a@gmail.com[3]

Article Info

Article history:

Received: 2 Agustus 2025
Revised: 14 Agustus 2025
Accepted: 15 Agustus 2025

Keywords:

Community participation
Livable Housing
Development
Talaga Jaya District

Kata Kunci:
Partisipasi Masyarakat
Rumah Layak Huni
Pembangunan
Kecamatan Talaga Jaya.

Abstract

This study aims to analyze community participation in the construction of Livable Housing (RLH) in Talaga Jaya District, Gorontalo Regency. The research focuses on four main indicators of participation: decision-making, implementation, monitoring and evaluation, and utilization of results. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of village officials, BPD members, and RLH assistance recipients in three villages: Hutadaa, Bunggalo, and Buhu. The findings indicate that the level of community participation varies across the four indicators. Community members tend to be more active in the implementation and utilization stages, as seen in activities such as working together during construction and maintaining the completed houses. In contrast, participation in decision-making and evaluation remains relatively low due to the limited availability of dedicated forums that directly involve residents. Several factors influence participation levels, including education, economic conditions, access to information, and local cultural values. In conclusion, the success of the RLH program is strongly linked to active community involvement from the planning stage through to maintenance. Enhancing mechanisms that encourage inclusive participation is essential to ensure that housing development is more equitable, responsive to community needs, and sustainable over the long term.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi empat indikator utama partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparat desa, anggota BPD, serta penerima bantuan RLH di tiga desa: Hutadaa, Bunggalo, dan Buhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berbeda pada setiap indikator. Masyarakat cenderung lebih aktif pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, seperti bergotong royong saat proses pembangunan dan memelihara rumah yang telah dibangun. Sebaliknya, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi masih rendah karena keterbatasan forum khusus yang melibatkan warga secara langsung. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi antara lain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, akses informasi, dan budaya lokal. Kesimpulannya, keberhasilan program RLH sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan.

Diperlukan perbaikan mekanisme pelibatan masyarakat secara menyeluruh agar pembangunan perumahan menjadi lebih adil, sesuai kebutuhan warga, dan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Dini Ariska
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
ariskadini04@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36%, dengan ketimpangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu indikator konkret dari kemiskinan ini adalah banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), yang berdampak langsung pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas sosial-ekonomi mereka (Wijayanto, 2021). Kondisi perumahan yang buruk memperdalam ketidaksetaraan dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus (Ningrum et al., 2024; Azqia et al., 2025). Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya menjawab persoalan ini dengan meluncurkan program pembangunan perumahan berbasis kesejahteraan, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara langsung (Khumayroh et al., 2024). Lebih lanjut, regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018 menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan berbasis kebutuhan lokal (Sidiq & Resnawaty, 2017; Sabrina , 2022). Partisipasi yang dimaksud bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan kesadaran, rasa memiliki, serta kontribusi tenaga, waktu, dan pemikiran (Chambers, 1994). Marhum dan Meronda (2021) secara lebih spesifik merumuskan empat indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi partisipasi masyarakat secara merata di berbagai daerah, terutama dalam konteks pembangunan RTLH. Penelitian yang dilakukan oleh Marwiyah et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program RTLH sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat, namun pada praktiknya, partisipasi tersebut sering kali bersifat simbolik dan top-down. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip pemberdayaan. Di sisi lain, studi oleh Priadi et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya kelembagaan lokal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan perumahan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks wilayah pinggiran seperti Kecamatan Talaga Jaya, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Talaga Jaya, Provinsi Gorontalo. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam empat indikator partisipasi menurut Marhum dan Meronda (2021) dan sejauh mana partisipasi tersebut memengaruhi efektivitas program RTLH. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tiga desa dengan karakteristik alokasi program berbeda, yaitu Desa Hutadaa, Bunggalo, dan Buhu. Kajian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur mengenai konteks partisipasi dalam pembangunan perumahan di daerah dengan keterbatasan intervensi pemerinta. Struktur artikel ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, urgensi, dan tujuan penelitian. Bagian kedua menguraikan kajian pustaka dan teori yang relevan. Bagian ketiga menyajikan metode penelitian. Bagian keempat membahas hasil dan analisis temuan lapangan, dan bagian terakhir adalah simpulan serta rekomendasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dianggap tepat karena

memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan dinamika partisipasi warga dalam konteks tertentu, terutama dalam kaitannya dengan implementasi program bantuan perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa, yaitu Desa Hutadaa, Bunggalo, dan Buhu, yang berada di bawah administrasi Kecamatan Talaga Jaya. Lokasi ini dipilih secara purposif karena ketiganya menunjukkan variasi dalam hal alokasi RLH dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Subjek penelitian adalah masyarakat penerima bantuan RLH, aparat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan pengalaman langsung dalam program RLH. Total informan sebanyak lima orang dari masing-masing desa, terdiri dari satu kepala desa, satu anggota BPD, dan tiga masyarakat penerima bantuan.

2.1 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam proses pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Talaga Jaya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bentuk partisipasi nyata masyarakat mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Peneliti mencatat setiap bentuk keterlibatan masyarakat, seperti kehadiran dalam rapat, kegiatan gotong royong, pengawasan pembangunan, dan upaya menjaga serta merawat rumah yang telah dibangun.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tatap muka antara peneliti dengan informan yang dilakukan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh makna dan pemahaman yang mendalam terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa aparat desa serta masyarakat penerima bantuan RLH. Informan yang diwawancarai meliputi Sekretaris Desa Bunggalo, Sekretaris Desa Buhu, Sekretaris Desa Hutadaa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penerima RLH di masing-masing desa. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan RLH. Alat yang digunakan untuk mendukung proses wawancara meliputi telepon genggam sebagai perekam suara, buku catatan, dan pena untuk mencatat informasi penting.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penelusuran dokumen, arsip, atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan literatur lain yang relevan. Sumber dokumentasi meliputi arsip dari Kantor Desa Hutadaa, Bunggalo, dan Buhu, serta sumber daring seperti situs resmi pemerintah. Metode ini digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pembangunan RLH di Kecamatan Talaga Jaya.

2.2 Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data tambahan yang relevan dengan fokus penelitian. Semua data yang diperoleh dikompilasi dan diorganisasi secara sistematis agar mudah dianalisis pada tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh di lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk memisahkan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini membantu peneliti mengabstraksikan informasi penting, membuang data yang tidak relevan, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih terstruktur.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk yang terorganisir, seperti narasi deskriptif, tabel, atau diagram, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antar temuan serta mempermudah dalam pengambilan keputusan penelitian.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi dilakukan sejak awal proses pengumpulan data untuk memastikan kebenaran dan validitas temuan penelitian. Data yang diperoleh diuji kembali melalui pembandingan dengan sumber lain atau konfirmasi kepada informan. Setelah peneliti yakin bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kesimpulan akhir ditarik. Kesimpulan ini menjadi hasil akhir penelitian yang memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan RLH di Kecamatan Talaga Jaya.

2.3 Pengecekkan Keabsahan

a. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan masyarakat, dokumen kebijakan pemerintah desa, dan hasil observasi lapangan. Triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat validitas data dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, dilakukan juga triangulasi waktu dengan melakukan pengamatan pada berbagai tahapan pembangunan RLH, sehingga dapat terlihat dinamika partisipasi masyarakat dari awal hingga akhir proses.

b. Member check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada para informan untuk memastikan bahwa pandangan, pendapat, dan pengalaman mereka terkait peran dalam pembangunan RLH telah dipahami dengan tepat oleh peneliti. Proses ini memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan klarifikasi atau menambahkan informasi baru yang mungkin belum terungkap pada wawancara sebelumnya.

c. Diskusi Teman Sejawat

Peneliti melakukan diskusi hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan rekan sejawat yang memiliki fokus penelitian serupa di bidang pembangunan atau sosial. Tujuan diskusi ini adalah untuk memastikan bahwa metode dan interpretasi data yang digunakan telah sesuai dengan teori dan praktik ilmiah. Selain itu, diskusi ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan, serta memperoleh perspektif tambahan yang dapat memperkuat analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Talaga Jaya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari lima desa, yakni Desa Hutadaa, Buhu, Luwoo, Bunggalo, dan Bulota. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan sebagian bekerja di sektor jasa, pendidikan, dan aparatur negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Talaga Jaya Dalam Angka 2023, populasi wilayah ini berjumlah 13.232 jiwa, tersebar dengan distribusi yang bervariasi di tiap desa.

Penelitian ini dilakukan pada tiga desa yang dipilih secara purposif, yaitu Desa Buhu, Bunggalo, dan Hutadaa, dengan pertimbangan bahwa ketiganya menunjukkan pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) yang aktif dan partisipasi masyarakat yang representatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan dianalisis berdasarkan teori partisipasi masyarakat menurut Marhum dan Meronda (2021), yang membagi tahapan partisipasi menjadi empat indikator utama: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan-evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

Tabel 1. Data Realisasi Rumah Layak Huni di Kecamatan Talaga Jaya

Tahun	Hutadaa	Bunggalo	Buhu
2019	30 unit	2 unit	35 unit
2020	-	-	-
2021	-	-	4 unit
2022	-	-	1 unit
2023	-	-	1 unit
2024	-	1 unit	10 unit
Total 2018-2024	84 unit		

Sumber: Kantor Desa Hutadaa, Bunggalo Dan Buhu (2024)

Dalam konteks Kecamatan Talaga Jaya, pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat juga terus diupayakan. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan ketimpangan partisipasi masyarakat antar desa menyebabkan intervensi program rumah layak huni tidak merata setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi tahun 2018–2024 dari Desa Hutadaa, Bunggalo, dan Buhu, terlihat bahwa pembangunan rumah layak huni mengalami fluktuasi besar. Misalnya, Desa Hutadaa hanya mendapat 30 unit rumah pada 2019 dan tidak menerima alokasi lagi hingga 2024. Desa Bunggalo menerima hanya 2 unit pada 2019 dan 1 unit pada 2024, tanpa alokasi di tahun-tahun lainnya. Sementara itu, Desa Buhu mendapat alokasi tertinggi, 35 unit pada 2019, kemudian mengalami penurunan dan fluktuasi di tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan teori partisipasi menurut Marhum dan Meronda (2021), partisipasi masyarakat seharusnya hadir secara utuh dalam setiap tahap pembangunan. Namun di Kecamatan Talaga Jaya, permasalahan muncul pada berbagai indikator. Dalam tahap pengambilan keputusan, masyarakat belum terlibat aktif dalam musyawarah atau perencanaan program RLH. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat memang turut bergotong royong, tetapi kontribusi mereka belum terkoordinasi secara sistematis. Dalam hal pemantauan dan evaluasi, tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberi masukan atau

mengawasi pelaksanaan program. Terakhir, pada tahap pemanfaatan hasil, rumah memang digunakan, namun kesadaran akan perawatan jangka panjang masih minim. Keempat hal ini menunjukkan lemahnya partisipasi dalam spektrum menyeluruh, sebagaimana dimaksud oleh Marhum dan Meronda.

3.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan adalah bagian krusial dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. Berdasarkan teori Marhum dan Meronda (2021), keterlibatan masyarakat sejak perencanaan bertujuan agar kebijakan atau program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam konteks RLH di Kecamatan Talaga Jaya, partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagian besar diwujudkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Wawancara dengan para sekretaris desa menunjukkan bahwa forum Musrenbang menjadi ruang utama membahas banyak program desa, termasuk RLH. Namun, pembahasan rumah layak huni di forum ini hanya bersifat umum, tanpa diskusi spesifik atau forum terfokus yang secara rinci membahas kriteria penerima, mekanisme seleksi, atau skala prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diundang, ruang artikulasi mereka dalam menentukan arah program masih terbatas.

Dari sisi masyarakat, sebagian besar informan mengaku pernah diundang dalam musyawarah desa, namun merasa belum mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengemukakan pendapat secara khusus terkait program RLH. Ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tahap simbolik (tokenism) sebagaimana dijelaskan dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), di mana keterlibatan masyarakat hanya sebatas kehadiran namun belum memiliki kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan.

3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap pelaksanaan adalah indikator nyata dari kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, dana, atau material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan RLH menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pembangunan rumah mereka. Mereka terlibat dalam bentuk menyumbang tenaga kerja, menyediakan bahan bangunan tambahan seperti batu dan semen, atau membantu proses pembangunan secara langsung.

Namun, partisipasi dari warga yang tidak menerima bantuan sangat terbatas. Kegiatan gotong royong hanya terjadi dalam lingkup keluarga atau tetangga dekat penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kolektivitas yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan belum sepenuhnya dimobilisasi dalam pelaksanaan program RLH. Padahal, berdasarkan konsep pembangunan partisipatif menurut Chambers (1994), partisipasi sejati menuntut keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya sebagai penerima manfaat langsung.

Minimnya keterlibatan masyarakat luas dalam tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa partisipasi di Talaga Jaya cenderung bersifat instrumentalis, yaitu masyarakat hanya dilibatkan sejauh program membutuhkan tenaga atau kontribusi tertentu. Ini juga menunjukkan adanya perbedaan budaya gotong royong antar desa yang menjadi faktor pembeda dalam keberhasilan pelaksanaan program RLH.

3.3 Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahap penting dalam siklus program pembangunan, karena pada tahap ini masyarakat dapat memberikan umpan balik, melakukan kontrol sosial, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Talaga Jaya cukup aktif dalam pemantauan, khususnya dalam mengamati proses pembangunan secara langsung. Mereka turut mengawasi kualitas bahan bangunan, progres pekerjaan, hingga kehadiran tukang.

Namun, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi formal masih sangat terbatas. Tidak terdapat forum atau pertemuan khusus yang dirancang untuk mengevaluasi pelaksanaan program RLH secara menyeluruh. Evaluasi lebih banyak dilakukan oleh aparat desa melalui monitoring langsung di lapangan. Informasi evaluasi program lebih sering disampaikan secara sepintas dalam laporan tahunan desa, tanpa keterlibatan luas dari masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi program masih bersifat teknokratis, bukan partisipatif. Padahal, berdasarkan pandangan Cohen dan Uphoff (1977), evaluasi yang partisipatif mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akseptabilitas program. Dalam kerangka partisipasi warga negara (citizen participation), masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga agen perubahan yang mampu memberi umpan balik kritis terhadap jalannya program.

3.4 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Tahap terakhir dalam kerangka partisipasi Marhum dan Meronda (2021) adalah pemanfaatan hasil. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat menggunakan, merawat, dan menjaga hasil program secara berkelanjutan. Di Talaga Jaya, ditemukan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan rumah layak huni sangat baik. Para penerima bantuan memanfaatkan rumah tersebut sebagai tempat tinggal utama dan menunjukkan tanggung jawab tinggi dalam merawatnya. Bahkan, ketika terjadi kerusakan, masyarakat dengan kesadaran sendiri segera memperbaiki tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

Partisipasi aktif dalam pemanfaatan ini menunjukkan adanya internalisasi rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Ini merupakan bentuk partisipasi pada level tertinggi dalam skala Arnstein, yakni citizen control. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk merawat dan memelihara rumah juga menunjukkan bahwa mereka telah melewati tahap partisipasi instrumental menuju partisipasi transformatif.

Pandangan Gilbert (2008) dan Moser (1998) tentang pentingnya dimensi psikososial dari perumahan layak terbukti dalam temuan ini. Rumah layak huni tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan martabat warga. Di sinilah indikator keberhasilan program RLH terlihat secara holistik: tidak hanya dari sisi output (rumah terbangun), tetapi juga outcome (kesejahteraan dan stabilitas sosial).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Talaga Jaya dan merujuk pada teori partisipasi menurut Marhum dan Meronda (2021), idealnya partisipasi masyarakat mencakup empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Namun, dalam implementasinya, partisipasi masyarakat di Kecamatan Talaga Jaya belum merata pada keempat tahap tersebut. Partisipasi yang tergolong baik terlihat pada tahap pemanfaatan hasil, di mana masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan dan merawat rumah secara baik. Rumah yang telah diberikan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang layak dan dijaga kebersihannya. Sebaliknya, pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat masih sangat terbatas.

Program RLH umumnya dibahas dalam forum Musrenbang yang bersifat umum dan tidak secara khusus melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan, menetapkan kriteria penerima, serta menentukan skala prioritas. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga suara mereka kurang terdengar dalam arah kebijakan program. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat hanya dominan dari pihak penerima bantuan, melalui sumbangan bahan bangunan seperti batu, pasir, dan semen, atau tenaga kerja secara langsung. Sementara itu, masyarakat non-penerima cenderung tidak terlibat kecuali memiliki kedekatan hubungan dengan penerima bantuan. Tahap pemantauan dan evaluasi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan program, namun belum maksimal dalam aspek evaluasi. Evaluasi masih didominasi oleh aparat desa atau pihak terkait tanpa melibatkan forum terbuka yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam memberi masukan dan refleksi terhadap pelaksanaan program.

Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif menurut Marhum dan Meronda yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk penilaian keberhasilan dan identifikasi kekurangan program. Selain itu, ditemukan pula permasalahan dalam hal kesenjangan distribusi penerima manfaat antar desa. Hal ini berkaitan erat dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam aspek administratif, khususnya dalam penyediaan lahan sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan. Menurut Marhum dan Meronda, partisipasi administratif merupakan elemen penting dalam proses pembangunan karena menunjukkan kesiapan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program. Ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam memenuhi aspek administratif ini menyebabkan beberapa desa mengalami kekosongan atau penurunan jumlah penerima bantuan tiap tahunnya, sehingga menimbulkan ketimpangan wilayah dalam pelaksanaan program RLH. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam program RLH di Kecamatan Talaga Jaya masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek perencanaan hingga evaluasi, agar pelaksanaan program dapat berjalan secara adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip partisipatif.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Talaga Jaya, penulis menyampaikan beberapa saran guna mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pertama, pemerintah sebaiknya melibatkan masyarakat sejak tahap awal, bukan hanya menjadikan mereka sebagai penerima bantuan. Keterlibatan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Musyawarah desa yang terbuka dan transparan dapat menjadi sarana efektif untuk menjaring aspirasi dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program RLH. Kedua, pemerintah desa perlu diberi kewenangan lebih luas untuk menentukan penerima manfaat RLH berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mewujudkan distribusi bantuan yang lebih adil dan tepat sasaran. Selanjutnya, akses informasi mengenai program RLH harus diperluas dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial, pamflet, atau pertemuan warga agar masyarakat lebih memahami prosedur, kriteria, dan manfaat program. Menghidupkan kembali semangat gotong royong juga menjadi aspek penting. Pemerintah dan tokoh masyarakat di desa dapat mendorong warga untuk saling membantu dalam proses pembangunan, baik melalui sumbangan tenaga, waktu, maupun bahan bangunan secara sukarela. Nilai gotong royong ini mampu memperkuat solidaritas sosial serta efektivitas pelaksanaan program. Agar partisipasi masyarakat semakin optimal, perlu diselenggarakan pelatihan dan pendampingan yang relevan,

seperti pelatihan teknik bangunan sederhana, manajemen keuangan, atau pemeliharaan rumah. Hal ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan RLH secara langsung. Akhirnya, program RLH perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya oleh aparat desa atau instansi terkait, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat agar mereka dapat memberikan masukan secara langsung terhadap jalannya program. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga menjadi wujud nyata dari prinsip partisipasi yang berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Kecamatan Talaga Jaya yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan waktu, informasi, dan pengalaman berharga dalam proses penelitian ini. Tanpa keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para perangkat desa, tokoh masyarakat, dan relawan lokal yang telah memberikan akses dan dukungan teknis selama kegiatan pengumpulan data. Kehadiran dan keterlibatan mereka sangat membantu dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni di tingkat desa.

REFERENSI

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, *35*(4), 216-224.

Azqia, M. N., Jalaluddin, M., & Handawati, R. (2025). Karakteristik Permukiman Kumuh di RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, *9*(2), 177-193.

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html

Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World development*, *22*(9), 1253-1268.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Cornell University.

Gilbert, A. (2008). Slums, tenants and home-ownership: on blindness to the obvious. *International Development Planning Review*, *30*(2), 1-10.

Kantor Desa Hutadaa, Kantor Desa Bunggalo, & Kantor Desa Buhu. (2024). *Data realisasi rumah layak huni di Kecamatan Talaga Jaya tahun 2019–2024* [Dokumen internal].

Khumayroh, A., Lindawati, Y. I., Widiansyah, S., Sosiologi, P., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). *Partisipasi Masyarakat Desa Salapraya pada Program Bantuan Rumah Layak Huni*.

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *2*(12), 141-149.

Marwiyah, S., Rahmadi, A. N., & Rizki, M. F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 Dalam Program (RTLH) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Studi Pada Kecamatan Kuripan Probolinggo. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *8*(8), 72-77.

Moser, C. (1998). The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies. *World Development*, 26 (1), 1-19.

Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *7*(2), 116-126.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2018.

Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model collaborative governance dalam penyediaan perumahan (Studi pada program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *7*(1), 152-164.

Sabrina, R. (2022). Strategi pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah berbasis partisipasi masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *22*(1).

Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 38.

Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, *8*(3).